

## KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,  
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2013 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut turut serta memberikan koreksi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan khususnya dilingkungan Bappeda dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Umumnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 2014

**KEPALA,**

**Ir. WIDODO HADI, Sp**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19570307 198303 1 010**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii-iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.5. Struktur Organisasi .....	26
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	27
2.1. RPJMD Provinsi Banten .....	27
2.2. Rencana Strategis .....	28
2.3. Target Kinerja Tahun 2013 .....	36
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2013 .....	38
2.5. Anggaran Per Kegiatan .....	41
2.6. Tolok Ukur dan Target Kinerja .....	42
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2013</b> .....	102
3.1. Evaluasi Kinerja .....	103
3.2. Akutanbilitas Keuangan .....	148
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	156

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan secara akuntabilitas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan secara periodik dan akuntabilitas. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku

kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2012.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2012 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2013.

4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013.

#### **1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut:

##### **A. Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
  - b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
  - c. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya;
  - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

- e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
  - f. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, perencanaan program dan anggaran pembangunan serta bidang pengendalian program pembangunan;
  - g. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian dengan dinas/badan/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, maupun dengan instansi lainnya;
  - h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah;
  - i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota;
  - j. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan perencanaan daerah;
  - k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - l. penataan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - m. pengawasan dan pengendalian internal Badan;
  - n. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana strategis Badan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi maupun dengan instansi lainnya;
  - c. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program nasional;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan daerah;
  - h. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah;

- i. memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi;
  - j. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
  - m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah;
  - c. Kepala Bidang Perekonomian;
  - d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan;
  - e. Kepala Bidang Pemerintahan;
  - f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan;
  - g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan;
  - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;
  - h. pengawasan dan pengendalian internal Badan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi Data Pembantu, penyusunan program dan data pembangunan;
  - g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
  - h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
  - i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
  - k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

### **C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
  - d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
  - f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
  - g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
  - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
  - i. melaksanakan fungsi kehumasandan administrasi pengelolaan informasi data pembantu;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
  - k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### **D. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kas anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Badan;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur keuangan Badan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan dari proses penganggaran, pelaksanaan, pembukuan, pengeluaran, evaluasi, verifikasi dan pelaporan keuangan Badan;
- h. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- j. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
- k. melaksanakan dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian internal Badan;
- l. melaksanakan penyiapan data, perhitungan kas anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
- m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
  - b. menyusun rencana kerja Badan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan, pengolahan data dan informasi internal badan dan pembangunan daerah;
  - g. menyusun pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;

- j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
- k. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- o. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **F. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah**

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah pada mitra bidang;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah/dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan tata ruang pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. menyiapkan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.

#### **G. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan lingkungan hidup;

- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan strategis daerah dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **H. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah**

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Insfrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerahbidang penataan infrastruktur wilayah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **I. Kepala Bidang Perekonomian**

- (1) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketahanan pangan dan agribisnis, serta mitra bidangnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan

- transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. menyiapkan program bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
  - b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis.

#### **J. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise**

- (1) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise bagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **K. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis**

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **L. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan**

- (1) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan pada mitra bidangnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan, serta perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, antar sektor dan wilayah;
  - c. pengkoordinasian, pengintegrasian, mensinkronasikan usulan-usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;

- d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - d. merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan di kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. menyiapkan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
  - b. Kepala SubBidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.

**M. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender**

- (1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender;
- d. melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **N. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan**

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **O. Kepala Bidang Pemerintahan**

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban, serta mitra bidangnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah,serta perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - f. menyiapkan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;

- g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
  - b. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.

**P. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan;
  - d. melaksanakan inisiasi, mediasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian, kerjasama pembangunan mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**Q. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban**

- (1) Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan koordinasi perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, perencanaan strategis daerah dan pengendalian mitra Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **R. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;

- d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang penganggaran pembangunan dan program pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan;
  - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;
  - f. menyiapkan program bidang perencanaan program dan pembangunan;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
  - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan.

#### **S. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sub bidang;

- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penganggaran pembangunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
- d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **T. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan**

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan;
  - e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
  - f. melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan jangka menengah provinsi;
  - g. melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
  - h. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten;
  - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **U. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan**

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - b. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - c. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja bidang;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
  - d. menyiapkan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
  - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian dan evaluasi APBN;
  - f. menyiapkan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:

- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**V. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja sub bidang;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD;
  - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

**W. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

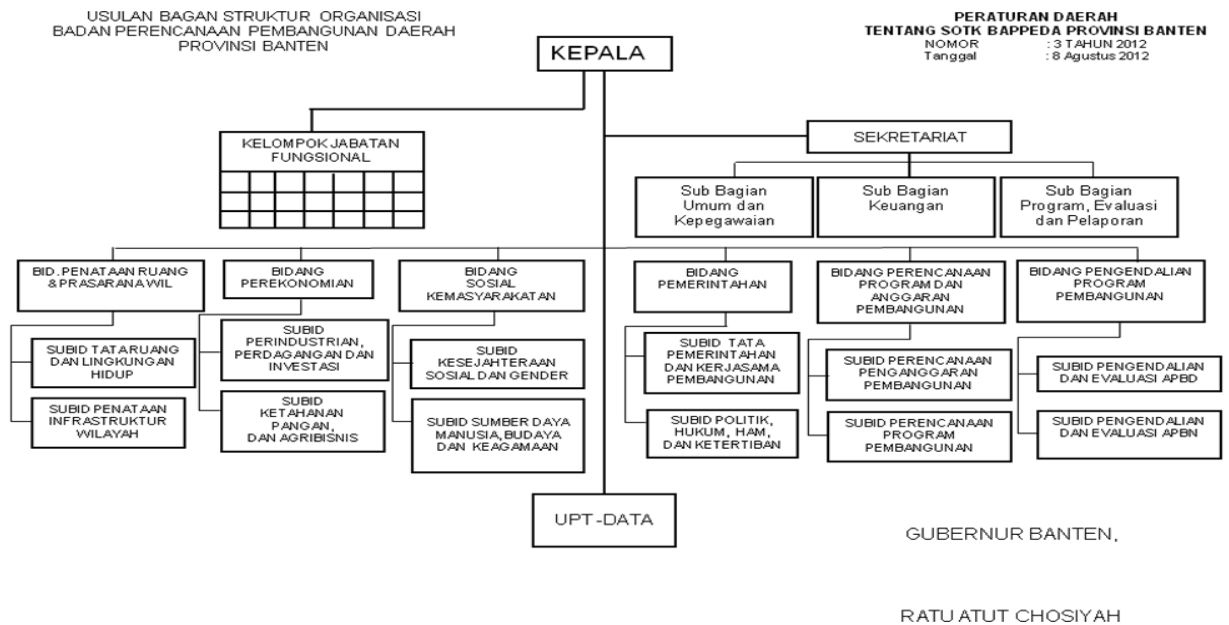
- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian Program APBN dan dana lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang;
- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program APBN dan dana lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

### 1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

#### STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN**

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2012 dengan memperhatikan agenda dan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), serta komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten.

Periode tahun 2007-2012, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah **“BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.

Keberhasilan pencapaian sasaran agenda pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja pada masing – masing agenda, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam visi – misi pembangunan 5 (lima) tahun yang ditetapkan. Sehingga dalam tahun 2012 ini, target pencapaian Indikator Makro Pembangunan (IMP) adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 72,88 %;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,5 – 6,8 %;
3. Indeks Pembangunan Daerah ditargetkan sebesar 89,2 – 98 %;
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 67,4 %;
5. Penurunan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin ditargetkan sebesar 650.000 – 600.000 jiwa;
6. Penurunan Jumlah Pengangguran Terbuka yang ditargetkan sebesar 620.000 – 600.000 jiwa.

## **2.2. RENCANA STRATEGIS**

Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

**Visi** merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka **Bappeda Provinsi Banten** menetapkan **Visi Tahun 2012-2017** adalah:

**“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”**

**Makna** yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

**1. Profesional.**

- a. Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka regulasi dan ketentuan organisasi;
- b. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten;
- c. Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
- d. Melahirkan dokumen produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya.
- e. Produk dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

**2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.**

- a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntable;
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan *Bottom up Planning*.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu:

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.**

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sarasanya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 **“Profesional Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Implemetatif”**, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) **Misi Bapeda Provinsi Banten 2012-2017** sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.**
- 2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**
- 3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
- 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

## **A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

**Tujuan** adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

### **1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
- b. Memperkuat struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Memperkuatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

**2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**

Tujuannya adalah:

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasarannya adalah:

Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

**3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Tujuannya adalah:

Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasarannya adalah:

Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

**4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan.
- b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan yang diukur dari (indikator):
  - 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator):
  - 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
  - 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.
  - 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
  - 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan**  
**Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>INDIKATOR SASARAN</i>	<i>TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN</i>				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.</b>	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.	RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
	Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat	Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat	1) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam		2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	maupun daerah.	maupun daerah.	penyusunan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.. 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.	-	-	-	-	-
<b>Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.</b>	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
<b>Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</b>	Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen data statistik dan data spasial.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan</b>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan	100%	100%	100%	100%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.	dan aparatur perencana.	dan aparatur perencana.	Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.	100%	100%	100%	100%	100%
			2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%
			4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.					

### 2.3. Target Kinerja Tahun 2013

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif, indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

- Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014
- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014
- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2013
- Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2012
- Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD dan APBN Tahun 2013

b. Perencanaan Strategis

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
- Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten) Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Jawa dan Sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten
- Penyusunan Dokumen MP3KI
- Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Tahun 2013
- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2013
- Pemetaan Kemiskinan Banten
- Laporan Status Pencapaian MDGs Provinsi Banten
- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014
- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten
- Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN Terpadu Baros
- Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota SERAGON
- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan

#### **2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2013**

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2013 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 21 (dua puluh satu) Indikasi Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2013.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok)
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (100%)
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%)
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
  - a. Capaian Program : Tercapaiannya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok)
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
  - a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
  - b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%)
  - c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
  - d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

- a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata
5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan
6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan
9. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
10. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan
11. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya
14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20. Peningkatan Kapasitas Aparatur

21. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

**2.5. Anggaran per kegiatan**

Anggaran kegiatan pada tahun 2013, sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
<b>I</b>	<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>	<b>800.000.000,-</b>	<b>800.000.000,-</b>
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	800.000.000,-	800.000.000,-
<b>II</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>10.149.500.000,-</b>	<b>10.061.974.000,-</b>
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.250.000.000,-	2.219.500.000,-
3	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	999.500.000,-	942.500.000,-
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1.200.000.000,-	1.126.974.000,-
5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	900.000.000,-	950.000.000,-
6	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-
7	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	650.000.000,-	723.000.000,-
8	Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan	700.000.000,-	650.000.000,-
9	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	750.000.000,-	750.000.000,-
10	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	700.000.000,-	700.000.000,-
11	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	800.000.000,-	800.000.000,-
<b>III</b>	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>1.900.000.000,-</b>	<b>2.100.000.000,-</b>
12	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1.195.000.000,-	1.354.000.000,-
13	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755.000.000,-	755.000.000,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	
		MURNI	PERUBAHAN
<b>IV</b>	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	<b>1.400.000.000,-</b>	<b>1.400.000.000,-</b>
14	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.400.000.000,-	1.400.000.000,-
<b>V</b>	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.750.000.000,-</b>	<b>1.740.000.000,-</b>
15	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	400.000.000,-	400.000.000,-
16	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.350.000.000,-	1.340.000.000,-
<b>VI</b>	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>	<b>7.850.500.000,-</b>	<b>8.581.826.000,-</b>
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.900.500.000,-	2.610.460.000,-
18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.800.000.000,-	1.861.046.000,-
19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.650.000.000,-	3.600.320.000,-
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur	500.000.000,-	510.000.000,-
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	<b>650.000.000,-</b>	<b>650.000.000,-</b>
21	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	650.000.000,-	650.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.533.800.000,-</b>	<b>25.333.800.000,-</b>

## 2.6. Tolok Ukur Dan Target Kinerja

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2013 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
<b>I</b>	<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>		
1	Perencanaan dan	1. Evaluasi dan	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
		2. Penyusunan Usulan Rancangan Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 kali rapat
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Kali Asistensi
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Kali Rapat
		5. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Daerah	3 Kali Rapat
		6. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 Dokumen
		7. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan	2 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Ruang Daerah Provinsi Banten	
		8. Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 Dokumen
		9. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
		10. Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	1 Dokumen
		11. Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen
II	Perencanaan dan Panganggaran Pembangunan Daerah		
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Forum Konsultasi Publik	1 Dokumen
		2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014	7 Dokumen
		3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	2 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		4. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen
		5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen
		6. Verifikasi Akhir Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen
		7. Fasilitasi Dan Konsultasi Rancangan RPJMD Kabupaten/Kota	3 Dokumen
		8. Penyusunan Bahan Masukan Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Dokumen
		9. Pemantauan Musrenbang Kecamatan KPP/KSP	3 Dokumen
		10. Penyusunan Rancangan Nomenklatur Kegiatan Dan Tolok Ukur Kegiatan SKPD Provinsi Banten Tahun 2015	1 Dokumen
		11. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
3	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014	2 Dokumen
		2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2013	2 Dokumen
		3. Fasilitasi MUSRENBANGNAS	1 Dokumen
		4. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen
		5. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Evaluasi Dan Pengendalian dan Pelaksanaan Renstra SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan
		2. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi,	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Kebudayaan Dan Pariwisata TA 2014	
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2014	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		5. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan
		6. Koordinasi Perencanaan Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen 1 Kali Kegiatan
		7. Penyusunan Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan
		8. Workshop	1 Dokumen (8

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	buku) 1 Kali Kegiatan
		9. Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan
		10. Workshop MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		11. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		12. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		13. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		14. Penyusunan Rencana Aksi Daerah MP3Ei Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan
		15. Workshop Rencana Aksi Daerah MP3Ei Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		16. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan
		17. Workshop Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		18. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	1 Dokumen (32 buku) 4 Kali Kegiatan
		19. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan KEK Tanjung Lesung	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan
		20. Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen (2 buku) 1 Kali Kegiatan
5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi dan Pengendalian Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen
		2. Penyusunan Usulan Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen
		3. Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen
		4. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	1 dokumen
		5. Penajaman Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		6. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen
		7. Sinkronisasi Perencanaan Non APBD	1 dokumen
		8. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 dokumen
		9. Rapat Koordinasi Kawasan Agropolitan	2 dokumen
		10. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	1 dokumen
		11. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	2 dokumen
		12. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen
		13. Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2 dokumen
		14. Perencanaan Kebutuhan Pangan Dalam Rangka	1 dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Mendukung KEK Pariwisata	
6	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan RENSTRA 2012-2017 dan RENJA 2013 SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 Dokumen
		2. Koordinasi Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen
		3. Asistensi Rancangan RENJA Awal Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen
		4. RAKORBID Mitra Bidang Tata Ruang dan Praswil	1 Dokumen Prosiding
		5. Verifikasi Rancangan RENJA Akhir Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen
		6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		7. Rapat Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen
		8. Rapat Koordinasi Perencanaan KONREG Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014	1 Dokumen
		9. Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL	1 Dokumen
		10. Workshop Fasilitasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding
		11. Workshop Fasilitasi Penyusunan Dokumen Momerandum Program sktor Sanitasi (MPSS) Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding
		12. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2013	1 Dokumen
		13. Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan AMPL/PPSP Pokja	1 Dokumen Prosiding

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2013	
		14. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen
		15. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen
		16. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 Dokumen
		17. Lokakarya Penanganan Infrastruktur Mendukung Daya Saing Daerah	1 Dokumen Prosiding
		18. Update Data Buku Saku AMPL	1 Dokumen
		19. Rakor Kesiapan Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	1 Dokumen Prosiding
		20. Review RENSTRA AMPL Provinsi	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		21. Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN Terpadu Baros	1 Dokumen Kajian
		22. Rapat Koordinasi Target Capaian SKPD Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen Kajian
		23. Analisa Pengembangan Kebutuhan Peralatan dan Material Dalam Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Banten	1 Dokumen
7	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012--2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen
		2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen
		4. Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen
		5. Rakor Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen
		6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen
		7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen
		8. Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen
		9. Koordinasi Perencanaan dan Panganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
8	Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan	1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok
		2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok
		3. Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok
		4. Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok
		5. Rakorbid Pemerintahan 2013	1 Dok
		6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dok
		7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok
		8. Rakor	1 Dok

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
		Perencanaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	
		9. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)	1 Dok
		10. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Musrenbang Regional Se Jawa Bali Tahun 2013	1 Dok
9	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2012-2017 dan RENJA Tahun 2012 SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender	2 Dokumen
		2. Koordinasi Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender	1 Dokumen
		3. Asistensi Rancangan Awal RENJA SKPD Mitra	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	
		4. RAKORBID Mitra Bidang SOSMAS Tahun 2013	1 Dokumen
		5. Verifikasi Rancangan akhir RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	1 Dokumen
		6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen
		7. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA)	2 Dokumen
		8. Evaluasi dan Perencanaan Penanggulangan HIV/AIDS	1 Dokumen
		9. Evaluasi dan Perencanaan PUG dan PUHA	2 Dokumen
		10. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
10	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 dan Renja SKPD Mitra Tahun 2012	1 Dokumen
		2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen
		5. Perencanaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah	1 Dokumen
		6. Perencanaan Pengembangan SDM, Budaya dan Keagamaan	1 Dokumen
		7. Perencanaan Pengembangan Daya Saing SDM Banten	2 Dokumen
		8. Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	2 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
11	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012	15 Dokumen
		2. Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs 2015	1 Dokumen
		3. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	1 Dokumen
		4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen
		5. Penyusunan Laporan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	3 Dokumen
		6. Pelatihan Analisis Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen
		7. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
		2014	
		8. Penyusunan Dokumen MP3KI	1 Dokumen
		9. Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T)	1 Dokumen
		10. Pelatihan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen
III	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>		
12	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2012	1 Dokumen (40 Buku)
		2. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012	1 Dokumen (200 Buku)
		3. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2013	2 Dokumen (80 Buku)
		4. Penyusunan	4 Dokumen (80

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	Buku)
		5. Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen (50 Buku)
		6. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	2 Dokumen (60 Buku)
		7. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	4 Dokumen (80 Buku)
		8. Penyusunan Instrumen Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 Dokumen (50 Buku)
		9. Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2013	1 Dokumen Prosiding
		10. Penyusunan Instrumen Pengukuran Skala	1 Dokumen (50 Buku)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
		Kepuasan Masyarakat	
		11. Penyusunan Instrumen Survei Skala Komunikasi dan Koordinasi antar Instansi Pemerintah	1 Dokumen (50 Buku)
13	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	1. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2013	8 Dokumen (160 Buku)
		2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013	4 Dokumen (60 Buku)
		3. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2013	2 Dokumen (40 Buku)
IV	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>		
14	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Pembangunan Daerah Tahun 2012	
		2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	1 Dokumen
		3. Asistensi Renja Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014	4 Dokumen
		4. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013-2014	1 Dokumen
		5. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen
		6. Musrenbangtas Banten - Jabar Tahun 2013	1 Dokumen
		7. Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tahun 2014	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
		8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota SERAGON	1 Dokumen
		9. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) Tahun 2013	1 Dokumen
		10. Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2013	1 Dokumen
		11. Rakor Musrenbangreg se Jawa Bali	1 Dokumen
V	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>		
15	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2012	1 Dokumen
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Anggaran Internal Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	
		3. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen
		4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen
		5. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Provinsi Banten.	
		6. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013.	1 Dokumen
		7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I; Prognosis 6 (enam bulan berikutnya) dan Semester II.	1 Dokumen
		8. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen
		9. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA.2013 Periode TW.I; TW.II;TW.III dan TW.IV	
		10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I dan Semester II	1 Dokumen
		11. Penyusunan Dokumen Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen
16	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bappeda	18 Dokumen
		2. Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2012	1 Dokumen
		3. Penyusunan LKPJ Bappeda Tahun 2012	1 Dokumen
		4. Penyusunan LPPD	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Bappeda Tahun 2012	
		5. Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2013	1 Dokumen
		6. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Bappeda Tahun 2013	1 Dokumen
		7. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014	1 Dokumen
		8. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014	1 Dokumen
		9. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 Dokumen
		10. Forum Saresehan	1 Dokumen
		11. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi Banten	1 Dokumen
		12. Forum Program,	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Evaluasi dan Pelaporan SKPD se Provinsi Banten	
		13. Sistem Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Bappeda	1 Dokumen
		14. Penyusunan Rancangan Awal Pergub Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SPPPD) Provinsi	1 Dokumen
		15. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Bappeda	1 Dokumen
		16. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2013	1 Dokumen
		17. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
1	2	3	6
		Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Tahun Anggaran 2013	
		18. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA)	1 Dokumen
		19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen pengendalian Daerah (SIMPELDA)	1 Dokumen
		20. Pembuatan Aplikasi Perpustakaan Khusus	1 Aplikasi
VI	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>		
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit
		2. Pengadaan Mesin Vacuum Cleaner	2 Unit
		3. Pengadaan Almari Besi	6 Unit
		4. Pengadaan Filling	6 Unit

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Kabinet	
		5. Pengadaan Toilet Jongkok dan Toilet Duduk	1 Paket
		6. Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan	1 Paket
		7. Pengadaan Pintu Kaca	1 Paket
		8. Pengadaan Electrical Pintu Kaca	1 Paket
		9. Pengadaan Pager di Lingkungan Kantor Bappeda	1 Paket
		10. Pengadaan Komputer PC	10 Unit
		11. Pengadaan Notebook	5 Unit
		12. Pengadaan Printer	5 Unit
		13. Pengadaan Meubelair Kantor (Kursi, Meja, Rak Buku/TV)	1 Paket
		14. Pengadaan Interior Ruang Kepala Bappeda	1 Paket
		15. Pengadaan Interior Ruang Loby Bappeda	1 Paket
		16. Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda	1 Paket

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		17. Pengadaan Audio System Ruang Front Office	1 Paket
		18. Pengadaan AC	11 Unit
		19. Pengadaan Handy Talki	5 Unit
		20. Pengadaan Mesin Air	1 Unit
		21. Pengadaan AC Split 1 PK	4 Unit
		22. Pengadaan TV LED	4 Unit
		23. Pengadaan Infocus + Screnfiw	2 Unit
		24. Pengadaan Pager Halaman Kantor Bappeda (Lanjutan)	1 Paket
		25. Pengadaan Penambahan Ruang Genzet	1 Paket
		26. Pengadaan Penambahan Ruang Keamanan	1 Paket
		27. Pengadaan Komputer/PC	5 Unit
		28. Pengadaan Pc Tablet	3 Unit
		29. Pengadaan Note Book	4 Unit
		30. Pengadaan Printer	1 Ls
		31. Pengadaan Sofa Tamu	1 Set

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		32. Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pemerintahan	1 Paket
		33. Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda (Sebelah Barat)	1 Paket
		34. Pengadaan Speaker Aktif	1 Set
		35. Pengadaan Vertikal Blind	1 Paket
18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 18 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua
		3. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1. Penunjang Penguatan Kelembagaan	5 Dokumen
		2. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		3. Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan
		4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan
		5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	12 Bulan
		6. Konsultasi dan Koordinasi dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	12 Bulan
		7. Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 Bulan
20	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Peningkatan Kemampuan dan Eksistensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 Orang Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 1 kali kegiatan
		2. Bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Rencana Strategis Internal Bappeda Provinsi Banten	30 Orang, Pegawai Bappeda Provinsi Banten 1 kali kegiatan
		3. Fasilitasi Kenaikan Gaji Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi	2 kali fasilitasi kenaikan pangkat dan golongan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
		Banten	
		4. Fasilitasi kenaikan gaji berkala dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	Pegawai PNS Bappeda Provinsi Banten
		5. Fasilitasi Perkuatan kelembagaan dan validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan
		6. Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten
		7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 10 kali kegiatan
		8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3 Orang PNS Bappeda Provinsi Banten
		9. Koordinasi/ Konsultasi Kepegawaian	8 kali kegiatan
VII	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>		
21	Penyediaan Data dan	1. Koordinasi dan	1 Dokumen; 7 kali

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	Informasi Pembangunan	Konsultasi Data Daerah	Rapat
		2. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	1 Dokumen
		3. Penyusunan Profile Informasi Pembangunan	1 Dokumen
		4. Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen
		5. Pelaporan Kinerja Kegiatan	1 Dokumen
		6. Penyusunan Data Bappeda	1 Dokumen

## **2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2013**

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, dijelaskan pada tabel berikut ini :

**PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : BAPPEDA PROVINSI BANTEN

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	3 dok	1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	800,000,000
			1 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	
			1 kali	- Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Tata Ruang dan SDA	
			1 kali	- Asistensi Rancangan Awal Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan SDA	
			1 kali	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan SDA	
			3 kali	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Daerah	
			1 dok	- Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 kali	- Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	
			1 dok	- Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			1 kali	- Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	
			1 dok	- Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	
2.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	2. Perencanaan Pembangunan Daerah	2,250,000,000
			2 dok	- Forum Konsultasi Publik	
			5 dok	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014	
			2 dok	- Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 dok	- Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 dok	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	
			1 dok	- Verifikasi Akhir Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2014	
			3 dok	- Fasilitasi dan Konsultasi Rancangan RPJMD Kabupaten/Kota	
			3 dok	- Penyusunan Bahan Masukan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			3 dok	- Pemantauan Musrenbang Kecamatan KPP/KSP	
	-			3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	999,500,000
			2 dok	- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014	
			2 dok	- Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2013	
			1 dok	- Fasilitasi Musrenbangnas	
			1 dok	- Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	
				4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1,200,000,000
			1 dok (3 buku)	- Evaluasi Dan Pengendalian dan Pelaksanaan Renstra SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	
			1 dok (3 buku)	- Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Dan Pariwisata TA 2014	
			1 dok (8 buku)	- Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	
			1 dok (8 buku)	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2014	
			1 dok (3 buku)	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	
			1 dok (1 kali)	- Koordinasi Perencanaan Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	
			1 dok (9 buku)	- Penyusunan Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	
			1 dok (8 buku)	- Workshop Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	
			1 dok (1 paket)	- Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	
			1 dok (8 buku)	- Workshop MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok (8 buku)	- Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	
			1 dok (8 buku)	- Evaluasi Pelaksanaan MP3EI koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	
			1 dok (8 buku)	- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung	
			1 dok (9 buku)	- Penyusunan Rencana Aksi Daerah MP3Ei Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	
			1 dok (8 buku)	- Workshop Rencana Aksi Daerah MP3EI Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	
			1 dok (9 buku)	- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten	
			1 dok (8 buku)	- Workshop Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok (32 buku)	- Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	
			1 dok (8 buku)	- Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan KEK Tanjung Lesung	
			1 dok (3 buku)	- Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	
				5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	900,000,000
			1 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Mitra	
			1 dok	- Penyusunan Usulan Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	
			1 dok	- Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Mitra	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Perekonomian	
			1 dok	- Penajaman Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	
			1 dok	- Sinkronisasi Perencanaan Non APBD	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Kawasan Agropolitan	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Sentra Produksi	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Giz	
			1 dok	- Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
			1 dok	- Perencanaan Kebutuhan Pangan Dalam Rangka Mendukung KEK Pariwisata	
				6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1,200,000,000
			1 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	
			1 dok	- Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	
			1 dok	- Asistensi Rancangan Renja Awal Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	
			1 dok	- Rakorbid Mitra Bidang Tata Ruang dan Praswil	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Renja Akhir Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Perencanaan Konreg Bidang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014	
			1 dok	- Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL	
			1 dok	- Workshop Fasilitasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab/Kota	
			1 dok	- Workshop Fasilitasi Penyusunan Dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kab/Kota	
			1 dok	- Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2013	
			1 dok	- Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan AMPL/PPSP Pokja Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2013	
			1 dok	- Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan Permukiman	
			1 dok	- Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	
			1 dok	- Lokakarya Penanganan Infrastruktur Mnedukung Daya Saing Daerah	
			1 dok	- Update Data Buku Saku AMPL	
			1 dok	- Rakor Kesiapaan Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)	
			1 dok	- Review Renstra AMPL Provinsi	
			1 dok	Study Kebutuhan Infrastruktur	
				- Dasar Mendukung Kawasan Agropolitan Terpadu Baros	
				7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	650,000,000
			1 dok	- Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012--2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	
			1 dok	- Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	
			1 dok	- Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	
			1 dok	- Rakor Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	
			1 dok	- Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	
			1 dok	- Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2014	
				8. Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan	700,000,000
			1 dok	- Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	
			1 dok	- Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	
			1 dok	- Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	
			1 dok	- Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Rakorbid Pemerintahan 2013	
			1 dok	- Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	
			1 dok	- Rakor Perencanaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	
			1 dok	- Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	
				9. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	750,000,000
			2 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 dan Renja Tahun 2012 SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender	
			1 dok	- Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender	
			1 dok	- Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	
			1 dok	- Rakorbid Mitra Bidang Sosmas Tahun 2013	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	
			2 dok	- Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA)	
			1 dok	- Evaluasi Dan Perencanaan Penanggulangan HIV/AIDS	
			2 dok	- Evaluasi dan Perencanaan PUG dan PUHA	
			1 dok	- Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat	
				10. Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	700,000,000
			1 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 dan Renja SKPD Mitra Tahun 2012	
			1 dok	- Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Tahun 2014	
			1 dok	- Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Tahun 2014	
			1 dok	- Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Tahun 2014	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Perencanaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah	
			1 dok	- Perencanaan Pengembangan SDM, Budaya dan Keagamaan	
			1 dok	- Perencanaan Pengembangan Daya Saing SDM Banten	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	
				11. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	800,000,000
			14 dok	- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012	
			2 dok	- Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs 2015	
			1 dok	- Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
			1 dok	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	
			3 dok	- Penyusunan Laporan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
			1 dok	- Pelatihan Analisis Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	
			1 dok	- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Penyusunan Dokumen MP3KI	
3.	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	100%	12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1,195,000,000
			1 Dok (40 buku)	- Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2012	
			1 Dok (200 buku)	- Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012	
			1 Dok (80 buku)	- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dok (80 buku)	- Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dok (80 buku)	- Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dok (60 buku)	- Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 Dok (80 buku)	- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	
				13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755,000,000
			8 Dok (160 buku)	- Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Tahun 2013	
			4 Dok (60 buku)	- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013	
			2 Dok (40 buku)	- Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2013	
4.	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dok	14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1,400,000,000
			1 dok	- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2012	
			1 dok	- Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	
			4 dok	- Asistensi Renja Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014	
			1 dok	- Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013-2014	
			1 dok	- Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2013	
			1 dok	- Musrenbangtas Banten - Jabar Tahun 2013	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tahun 2014	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota SERAGON	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) Tahun 2013	
			1 dok	- Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2013	
			1 dok	- Rakor Musrenbangreg se Jawa Bali	
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	400,000,000
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2012	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	
			1 dok	- Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(SBU) pada Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten.	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013.	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I; Prognosis 6 (enam bulan berikutnya) dan Semester II.	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA.2013 Periode TW.I; TW.II;TW.III dan TW.IV	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I dan Semester II	
				16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,350,000,000
			1 dok	- Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bappeda	
			1 dok	- Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2012	
			1 dok	- Penyusunan LKPJ Bappeda Tahun 2012	
			1 dok	- Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2012	
			1 dok	- Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2013	
			1 dok	- Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Bappeda Tahun 2013	
			1 dok	- Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014	
			1 dok	- Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	
			1 dok	- Forum Saresehan	
			1 dok	- Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi Banten	
			1 dok	- Forum Program, Evaluasi dan Pelaporan SKPD se Provinsi Banten	
			1 dok	- Sistem Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Bappeda	
			1 dok	- Penyusunan Rancangan Awal Pergub Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SPPPD) Provinsi	
			1 dok	- Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Bappeda	
			1 dok	- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2013	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 dok	- Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Tahun Anggaran 2013	
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	41 SKPD	17 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	650,000,000
			1 dok. 7 kalai rapat	- Koordinasi dan Konsultasi Data Daerah	
			4 dok	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	
			1 dok	- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan	
			1 dok	- Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten	
			1 dok	- Pelaporan Kinerja Kegiatan	
6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,900,500,000
			3 unit	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	
			2 unit	- Pengadaan Mesin Vacuum Cleaner	
			6 unit	- Pengadaan Almari Besi	
			6 unit	- Pengadaan Filling Kabinet	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1 paket	- Pengadaan Toilet Jongkok dan Toilet Duduk	
			1 paket	- Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan	
			1 paket	- Pengadaan Pintu Kaca	
			1 paket	- Pengadaan Electrical Pintu Kaca	
			1 paket	- Pengadaan Pager di Lingkungan Kantor Bappeda	
			10 unit	- Pengadaan Komputer PC	
			5 unit	- Pengadaan Notebook	
			5 unit	- Pengadaan Printer	
			1 paket	- Pengadaan Meubelair Kantor (Kursi, Meja, Rak Buku/TV)	
			1 paket	- Pengadaan Interior Ruang Kepala Bappeda	
			1 paket	- Pengadaan Interior Ruang Loby Bappeda	
			1 paket	- Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda	
			1 paket	- Pengadaan Audio System Ruang Front Office	
			11 unit	- Pengadaan AC	
			5 unit	- Pengadaan Handy Talki	
			1 unit	- Pengadaan Mesin Air	

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3,633,800,000
			5 dok	- Penunjang Penguatan Kelembagaan	
			12 bln	- Penyediaan Barang Habis Pakai	
			12 bln	- Penyediaan Bahan Cetak	
			12 bln	- Penyediaan Makan dan Minum Kantor	
			12 bln	- Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	
			12 bln	- Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor	
			12 bln	- Konsultasi dan Koordinasi dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	
		Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,800,000,000
			12 bln	- Pemeliharaan Gedung dan Halaman	
			12 bln	- Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	
			52 unit	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	
		Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan,		21 Peningkatan Kapasitas Aparatur	500,000,000

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Kegiatan dan Tolok Ukur</b>	<b>Anggaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian			
			100 org	- Peningkatan Kemampuan dan Eksistensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	
			2 kali	- Bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Rencana Strategis Internal Bappeda Provinsi Banten	
				- Fasilitasi Kenaikan Gaji Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	
				- Fasilitasi kenaikan gaji berkala dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	
				- Fasilitasi Perkuatan kelembagaan dan validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	
				- Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	
			10 kali	- Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	
			3 org	- Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
			8 kali	- Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian	
Jumlah anggaran Tahun 2013					24,533,800,000



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan implementasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* tercapai 94,50 % dan indikator kinerja *output* tercapai 98,06 % dan *outcome* tercapai sebesar 100 % Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan tercapai 100 %.

Berdasarkan capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran tersebut, maka rata-rata nilai capaian dari pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 sebesar 98.06 % dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja *input* capaian pengukurannya sebesar 94,50 % dengan nilai sangat baik.
2. Indikator kinerja *output* capaian pengukurannya sebesar 98,06 % dengan nilai sangat baik.
3. Indikator kinerja *outcome* capaian pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.
4. Indikator kinerja capaian program pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

Selanjutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Pengaturan asset (kendaraan dinas) belum tertib;

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2013**

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”.

### 3.1. EVALUASI KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah ditetapkan 1 (satu) sasaran, 7 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (Outcome).

Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	100%	100%	100%	100%
3	Pengendalian Pembangunan	Cakupan hasil pengendalian dan	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah	evaluasi pelaksanaan program pembangunan				
4	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	15 dok	3 dok	3 dok	100%
5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtangaan	100%	100%	100%	100%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	100%	100%
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepeg	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Data	Ketersediaan Data dan Informasi	10 dok	2 dok	2 dok	100%

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (akhir periode)	Target Kinerja Tahun Berjalan yang di evaluasi	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Daerah	Pembangunan				

1. Sasaran strategis (program) Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan dengan pagu sebesar Rp. 800.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 765.527.392,- (95.69%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Pertama**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**

**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>				
1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Usulan Rancangan Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 kali rapat	1 kali rapat	100
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Kali Asistensi	1 Kali Asistensi	100
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja 2014 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Kali Rapat	1 Kali Rapat	100
		5. Koordinasi Perencanaan Lintas	3 Kali Rapat	3 Kali Rapat	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Sektor dan Daerah			
		6. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		8. Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2. Sasaran strategis (program) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 10.061.974.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 9.668.364.290,- (96.09%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100% Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 10 (sepuluh) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Kedua**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.5**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
II	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Forum Konsultasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Dokumen Rencana	7 Dokumen	7 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014			
		3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		4. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Verifikasi Akhir Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Fasilitasi Dan Konsultasi Rancangan RPJMD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		8. Penyusunan Bahan Masukan Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		9. Pemantauan Musrenbang Kecamatan KPP/KSP	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		10. Penyusunan Rancangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Nomenklatur Kegiatan Dan Tolok Ukur Kegiatan SKPD Provinsi Banten Tahun 2015			
		11. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2013	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		3. Fasilitasi MUSRENBANGNAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	1. Evaluasi Dan Pengendalian dan	1 Dokumen ( 3 buku ) 1	1 Dokumen ( 3 buku ) 1	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksanaan Renstra SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kali Kegiatan	Kali Kegiatan	
		2. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata TA 2014	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan	100
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2014	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		5. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan	100
		6. Koordinasi Perencanaan Mitra	1 Dokumen 1 Kali	1 Dokumen 1 Kali	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kegiatan	Kegiatan	
		7. Penyusunan Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		8. Workshop Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		9. Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan	100
		10. Workshop MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		11. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		12. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI koridor jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		13. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		14. Penyusunan Rencana Aksi Daerah MP3Ei Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (9 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		15. Workshop Rencana Aksi Daerah MP3EI Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		16. Penyusunan Strategi Peningkatan	1 Dokumen (9 buku) 1	1 Dokumen (9 buku) 1	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Daya Saing Industri Petrokimia Banten	Kali Kegiatan	Kali Kegiatan	
		17. Workshop Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		18. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	1 Dokumen (32 buku) 4 Kali Kegiatan	1 Dokumen (32 buku) 4 Kali Kegiatan	100
		19. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan KEK Tanjung Lesung	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan	100
		20. Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen (2 buku) 1 Kali Kegiatan	1 Dokumen (2 buku) 1 Kali Kegiatan	100
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	1. Evaluasi dan Pengendalian Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen	1 dokumen	100
		2. Penyusunan Usulan Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen	1 dokumen	100
		3. Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen	1 dokumen	100
		4. Rapat Koordinasi Perencanaan dan	1 dokumen	1 dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan Bidang Perekonomian			
		5. Penajaman Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen	1 dokumen	100
		6. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra	1 dokumen	1 dokumen	100
		7. Sinkronisasi Perencanaan Non APBD	1 dokumen	1 dokumen	100
		8. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100
		9. Rapat Koordinasi Kawasan Agropolitan	2 dokumen	2 dokumen	100
		10. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	1 dokumen	1 dokumen	100
		11. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan	2 dokumen	2 dokumen	100
		12. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	100
		13. Penyusunan Naskah Akademis	2 dokumen	2 dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			
		14. Perencanaan Kebutuhan Pangan Dalam Rangka Mendukung KEK Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	100
5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RENSTRA 2012-2017 dan RENJA 2013 SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Koordinasi Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Asistensi Rancangan RENJA Awal Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. RAKORBID Mitra Bidang Tata Ruang dan Praswil	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		5. Verifikasi Rancangan RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Akhir Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014			
		6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Rapat Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Rapat Koordinasi Perencanaan KONREG Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Workshop Fasilitasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		11. Workshop Fasilitasi Penyusunan Dokumen Momerandum Program sktor Sanitasi (MPSS) Kab/Kota	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		12. Penjaminan Kualitas Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		PPSP Kab/Kota Tahun 2013			
		13. Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan AMPL/PPSP Pokja Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2013	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		14. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		15. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		16. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		17. Lokakarya Penanganan Infrastruktur Mendukung Daya Saing Daerah	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100
		18. Update Data Buku Saku AMPL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		19. Rakor Kesiapan Daerah Dalam	1 Dokumen Prosiding	1 Dokumen Prosiding	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)			
		20. Review RENSTRA AMPL Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		21. Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN Terpadu Baros	1 Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian	100
		22. Rapat Koordinasi Target Capaian SKPD Bidang Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen Kajian	1 Dokumen Kajian	100
		23. Analisa Pengembangan Kebutuhan Peralatan dan Material Dalam Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012--2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban			
		3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Rakor Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan RAD Pencegahan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Pemberantasan Korupsi			
		9. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan	1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		3. Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		4. Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		5. Rakorbid Pemerintahan 2013	1 Dok	1 Dok	100
		6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dok	1 Dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Tata Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		8. Rakor Perencanaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100
		9. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)	1 Dok	1 Dok	100
		10. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Musrenbang Regional Se Jawa Bali Tahun 2013	1 Dok	1 Dok	100
8	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2012-2017 dan RENJA Tahun 2012 SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		2. Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Rancangan RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender			
		3. Asistensi Rancangan Awal RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. RAKORBID Mitra Bidang SOSMAS Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Verifikasi Rancangan akhir RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		8. Evaluasi dan Perencanaan Penanggulangan HIV/AIDS	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Evaluasi dan Perencanaan PUG	2 Dokumen	2 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		dan PUHA			
		10. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 dan Renja SKPD Mitra Tahun 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Perencanaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Perencanaan Pengembangan SDM, Budaya dan Keagamaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Perencanaan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Daya Saing SDM Banten			
		8. Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	2 Dokumen	2 Dokumen	100
10	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		2. Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs 2015	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan Laporan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		6. Pelatihan Analisis Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Penanggulangan Kemiskinan			
		7. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan Dokumen MP3KI	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Pelatihan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

3. Sasaran strategis (program) Pengendalian Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 2.100.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.878.217.096,- (89.44%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
III	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>				
1	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2012	1 Dokumen (40 Buku)	1 Dokumen (40 Buku)	100
		2. Penyusunan LKPj Gubernur Banten	1 Dokumen (200 Buku)	1 Dokumen (200 Buku)	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Tahun 2012			
		3. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2013	2 Dokumen (80 Buku)	2 Dokumen (80 Buku)	100
		4. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	4 Dokumen (80 Buku)	4 Dokumen (80 Buku)	100
		5. Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen (50 Buku)	1 Dokumen (50 Buku)	100
		6. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013	2 Dokumen (60 Buku)	2 Dokumen (60 Buku)	100
		7. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010	4 Dokumen (80 Buku)	4 Dokumen (80 Buku)	100
		8. Penyusunan Instrumen Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017	1 Dokumen (50 Buku)	1 Dokumen (50 Buku)	100
		9. Sosialisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Permendagri Nomor 23 Tahun 2013	Prosiding	Prosiding	
		10. Penyusunan Instrumen Pengukuran Skala Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen (50 Buku)	1 Dokumen (50 Buku)	100
		11. Penyusunan Instrumen Survei Skala Komunikasi dan Koordinasi antar Instansi Pemerintah	1 Dokumen (50 Buku)	1 Dokumen (50 Buku)	100
2	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	1. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2013	8 Dokumen (160 Buku)	8 Dokumen (160 Buku)	100
		2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013	4 Dokumen (60 Buku)	4 Dokumen (60 Buku)	100
		3. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2013	2 Dokumen (40 Buku)	2 Dokumen (40 Buku)	100

4. Sasaran strategis (program) Kerjasama Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.400.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.176.017.939,-

(84,00%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 3 Dokumen yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.9**

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR  
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
IV	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>				
1	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Asistensi Renja Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		4. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013-2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Musrenbangtas	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Banten - Jabar Tahun 2013			
		7. Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota SERAGON	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastuktur Selat Sunda (KSISS) Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Rakor Musrenbangreg se Jawa Bali	1 Dokumen	1 Dokumen	100

5. Sasaran strategis (program) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.740.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.662.343.755,- (95,54%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.10**

### Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
2	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.11**

**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR  
KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
V	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>				
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013			
		5. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I; Prognosis 6 (enam	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		bulan berikutnya) dan Semester II.			
		8. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA.2013 Periode TW.I; TW.II;TW.III dan TW.IV	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I dan Semester II	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Dokumen Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bappeda Provinsi Banten			
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bappeda	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		2. Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan LKPJ Bappeda Tahun 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Bappeda Tahun 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		7. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		8. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Anggaran 2014			
		9. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		10. Forum Saresehan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		11. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		12. Forum Program, Evaluasi dan Pelaporan SKPD se Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		13. Sistem Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		14. Penyusunan Rancangan Awal Pergub Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SPPPD) Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		15. Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Laporan Akhir Kegiatan Bappeda			
		16. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		17. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Tahun Anggaran 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		18. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDAs)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen pengendalian Daerah (SIMPELDA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		20. Pembuatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Aplikasi Perpustakaan Khusus			

6. Sasaran strategis (program) Peningkatan Sarana, Prasarana Perakntoran dan Kapasitas Aparatur dengan pagu sebesar Rp. 8.581.826.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.405.376.993,- (97,94%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
2	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
3	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	Prosen	100	100	100%	100	100	100%
4	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	Prosen	100	100	100%	100	100	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.12**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
VI	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	4 Unit	100
		2. Pengadaan Mesin Vacuum Cleaner	2 Unit	2 Unit	100
		3. Pengadaan Almari Besi	6 Unit	6 Unit	100
		4. Pengadaan Filling Kabinet	6 Unit	6 Unit	100
		5. Pengadaan Toilet Jongkok dan Toilet Duduk	1 Paket	1 Paket	100
		6. Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan	1 Paket	1 Paket	100
		7. Pengadaan Pintu	1 Paket	1 Paket	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Kaca			
		8. Pengadaan Electrical Pintu Kaca	1 Paket	1 Paket	100
		9. Pengadaan Pager di Lingkungan Kantor Bappeda	1 Paket	1 Paket	100
		10. Pengadaan Komputer PC	10 Unit	10 Unit	100
		11. Pengadaan Notebook	5 Unit	5 Unit	100
		12. Pengadaan Printer	5 Unit	5 Unit	100
		13. Pengadaan Meubelair Kantor (Kursi, Meja, Rak Buku/TV)	1 Paket	1 Paket	100
		14. Pengadaan Interior Ruang Kepala Bappeda	1 Paket	1 Paket	100
		15. Pengadaan Interior Ruang Loby Bappeda	1 Paket	1 Paket	100
		16. Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda	1 Paket	1 Paket	100
		17. Pengadaan Audio System Ruang Front Office	1 Paket	1 Paket	100
		18. Pengadaan AC	11 Unit	11 Unit	100
		19. Pengadaan Handy Talki	5 Unit	5 Unit	100
		20. Pengadaan Mesin Air	1 Unit	1 Unit	100
		21. Pengadaan AC	4 Unit	4 Unit	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Split 1 PK			
		22. Pengadaan TV LED	4 Unit	4 Unit	100
		23. Pengadaan Infocus + Srenfiew	2 Unit	2 Unit	100
		24. Pengadaan Pager Halaman Kantor Bappeda (Lanjutan)	1 Paket	1 Paket	100
		25. Pengadaan Penambahan Ruang Genzet	1 Paket	1 Paket	100
		26. Pengadaan Penambahan Ruang Keamanan	1 Paket	1 Paket	100
		27. Pengadaan Komputer/PC	5 Unit	5 Unit	100
		28. Pengadaan Pc Tablet	3 Unit	3 Unit	100
		29. Pengadaan Note Book	4 Unit	4 Unit	100
		30. Pengadaan Printer	1 Ls	1 Ls	100
		31. Pengadaan Sofa Tamu	1 Set	1 Set	100
		32. Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	100
		33. Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda (Sebelah Barat)	1 Paket	1 Paket	100
		34. Pengadaan Speaker Aktif	1 Set	1 Set	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		35. Pengadaan Vertikal Blind	1 Paket	1 Paket	100
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman	12 Bulan	12 Bulan	100
		2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan, 18 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua	12 Bulan, 18 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 22 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua	100
		3. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	100
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1. Penunjang Penguatan Kelembagaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		2. Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12 Bulan	100
		3. Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12 Bulan	100
		4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
		5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan	12 Bulan	12 Bulan	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		PHBI/PHBN			
		6. Konsultasi dan Koordinasi dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten	12 Bulan	12 Bulan	100
		7. Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten	1. Peningkatan Kemampuan dan Eksistensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	100 Orang Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 1 kali kegiatan	100 Orang Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 1 kali kegiatan	100
		2. Bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Rencana Strategis Internal Bappeda Provinsi Banten	30 Orang, Pegawai Bappeda Provinsi Banten 1 kali kegiatan	30 Orang, Pegawai Bappeda Provinsi Banten 1 kali kegiatan	100
		3. Fasilitas Kenaikan Gaji Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	2 kali fasilitas kenaikan pangkat dan golongan	2 kali fasilitas kenaikan pangkat dan golongan	100
		4. Fasilitas kenaikan gaji berkala dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten	Pegawai PNS Bappeda Provinsi Banten	Pegawai PNS Bappeda Provinsi Banten	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		5. Fasilitasi Perkuatan kelembagaan dan validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan	Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan	100
		6. Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	100
		7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten	Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 10 kali kegiatan	Pegawai Bappeda Provinsi Banten, 10 kali kegiatan	100
		8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3 Orang PNS Bappeda Provinsi Banten	3 Orang PNS Bappeda Provinsi Banten	100
		9. Koordinasi/ Konsultasi Kepegawaian	8 kali kegiatan	8 kali kegiatan	100

7. Sasaran strategis (program) Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 650.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 628.237.200,- (96.65%) sedangkan realisasi fisik yang dicapai 100% dari target 100 % yang telah ditetapkan, hal ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan sehingga capaian dimaksud dapat terealisasi seluruhnya.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2012		Capaian Kinerja Tahun 2012	Tahun 2013		Capaian Kinerja Tahun 2013
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dengan capaian kinerja 2013 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana dan realisasi target kinerja tolok ukur kinerja output dari kegiatan dalam mendukung capaian indikator sasaran pada tahun 2013 dalam mencapai indikator sasaran, sebagai berikut:

**TABEL 3.14**  
**RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
VII	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>				
21	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1. Koordinasi dan Konsultasi Data Daerah	1 Dokumen; 7 kali Rapat	1 Dokumen; 7 kali Rapat	100
		2. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
		Profile Informasi Pembangunan			
		4. Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		5. Pelaporan Kinerja Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		6. Penyusunan Data Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100

### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini tidak berkinerja.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.008.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.379.836.930,- atau sebesar 91,04 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 25.333.800.000,- telah terealisasi sebesar Rp 24.184.084.665,- atau sebesar 95,46 % dan realisasi fisik mencapai 100 %, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pagu kegiatan Rp. 32.341.800.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 30.563.921.595,- atau sebesar 94,50% dan realisasi fisik mencapai 98,06%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN  
BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2013**

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan</b>	<b>800.000.000,-</b>			
1.	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	800.000.000,-	100	765.527.392,-	95.69
<b>II.</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>	<b>10.061.974.000,-</b>			
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	2.219.500.000,-	100	2.175.986.184,-	98.04
2.	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	942.500.000,-	100	911.170.440,-	96.68
3.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1.126.974.000,-	100	1.021.253.420,-	90.62
4.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan	950.000.000,-	100	942.169.200,-	99.18
5.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.200.000.000,-	100	1.119.077.500,-	93.26
6.	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	723.000.000,-	100	666.494.000,-	92.18
7.	Perencanaan dan	650.000.000,-	100	598.618.166,-	92.10

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian Tata Pemerintahan				
8.	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	750.000.000,-	100	745.029.380,-	99.34
9.	Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan	700.000.000,-	100	699.212.000,-	99.89
10.	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	800.000.000,-	100	789.354.000,-	98.67
<b>III .</b>	<b>Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>2.100.000.000,-</b>			
1.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	1.354.000.000,-	100	1.335.819.700,-	99.32
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	755.000.000,-	100	542.397.396,-	71.84
<b>IV .</b>	<b>Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	<b>1.400.000.000,-</b>			
1.	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.400.000.000,-	100	1.176.017.939,-	84.00
<b>V .</b>	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.740.000.000,-</b>			
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	400.000.000,-	100	394.724.000,-	98.68
2.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.340.000.000,-	100	1.267.619.755,-	94.60
<b>VI .</b>	<b>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran</b>	<b>8.581.826.000,-</b>			

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>dan Kapasitas Aparatur</b>				
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.610.460.000,-	100	2.570.276.000,-	98.46
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.861.046.000,-	100	1.791.999.000,-	96.29
3.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.600.320.000,-	100	3.540.574.373,-	98.34
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	510.000.000,-	100	502.527.620,-	98.53
<b>VII.</b>	<b>Penyediaan Data Pembangunan Daerah</b>	<b>650.000.000,-</b>			
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	650.000.000,-	100	628.237.200,-	96.65
	<b>J U M L A H</b>	<b>25.333.800.000,-</b>	<b>100</b>	<b>24.184.084.665,-</b>	<b>95.46</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	7.008.000.000,00	91.04	6.379.836.930,-	91.04
	<b>TOTAL</b>	<b>32.341.800.000.00</b>	<b>98.06</b>	<b>30.563.921.595,-</b>	<b>94.50</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan implementasi dari kegiatan program yaitu indikator kinerja *input* tercapai 94,50 % dan indikator kinerja *output* tercapai 98,06 % dan *outcome* tercapai sebesar 100 % Sedangkan tingkat capaian untuk sasaran yang saat kegiatan program dilaksanakan tercapai 100 %.

Berdasarkan capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran tersebut, maka rata-rata nilai capaian dari pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 sebesar 98.06 % dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja *input* capaian pengukurannya sebesar 94,50 % dengan nilai sangat baik.
2. Indikator kinerja *output* capaian pengukurannya sebesar 98,06 % dengan nilai sangat baik.
3. Indikator kinerja *outcome* capaian pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.
4. Indikator kinerja capaian program pengukurannya sebesar 100 % dengan nilai sangat baik.

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

Selanjutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah

Dalam rangka pencapaian pengukuran kinerja baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran sasaran pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum maksimal dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten;
2. Dalam Perencanaan pengendalian dan evaluasi diantaranya masih belum maksimal dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik internal maupun eksternal dilingkungan Bappeda Provinsi Banten;
3. Pengaturan asset (kendaraan dinas) belum tertib;